



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Siluman Terciduk

## Dua Pejabat Mundur Disorot Ombudsman

**JAKARTA** – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, terkuaknya mata anggaran siluman seperti terciduk oleh publik.

Bahkan, banyaknya pembenaran yang dilakukan pejabat Pemprov DKI tidak masuk akal. “Mereka seperti mengada-ada, seperti terciduk oleh publik,” kata dia menanggapi carut marutnya proses penyusunan APBD DKI 2020.

Sebelum dipublikasikan, tambah Uchok, seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh sejumlah pembantu atau staf gubernur.

Apalagi, keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, sangat bisa membantu mengkaji anggaran.

“Masalahnya ada problem sistem, yakni sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, dia bisa menguji,” tandas Uchok.

Sementara itu, Ombudsman DKI Jakarta mulai menyoroti dua pejabat aparat sipil negara (ASN) yang secara mendadak mundur dari jabatannya.

Pasalnya, bila mundurnya kedua pejabat itu ada tekanan maka bisa diartikan terjadi praktik mal administrasi.

“Sampai sekarang kami belum terima laporan itu sih yah. Tapi yang jelas kalau mundurnya mereka itu ada tekanan, bisa disinyalir terjadi mal administrasi,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DKI Jakarta Teguh P Nugrogo, Selasa (5/11/2019).

Teguh mengakui, kewenangan awal untuk menindaklanjuti masalah mundurnya dua pejabat ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu sebenarnya ada di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Namun, bila ada laporan yang tidak dilanjuti, maka pihak ombudsman bakal mengambil tindakan. “Aturannya memang ditindak lanjuti dulu oleh KASN,” kata dia.

Meski demikian, kata Teguh, seharusnya eksekutif dan legislatif tidak terjebak dalam polemik anggaran. Seharusnya yang dibahas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki serapan anggarannya rendah.

Sehingga, di 2020, masalah tidak terulang kembali. “Ini kan masalah kepentingan masyarakat juga, jadi harus fokus juga ke yang lain,” imbu Teguh.

Sebenarnya, sambung Teguh, secara aturan tidak ada yang mengikat eksekutif untuk membuka sistem e-budgeting. Secara etika, mereka harus berani membuka nilai transparansi anggaran untuk pembangunan warga ibu kota.

“Memang tidak ada kewajiban Pemprov DKI membuka anggaran, tapi ini kan masalah etika saja,” papar dia.

Bukan Tanggung Jawab DKI

Salah satu anggaran yang menuai sorotan yakni anggaran turap kali yang melintas di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di 2020 sebesar Rp5 miliar. Alokasi tersebut terpaksa dicoret.

“Yah memang didrop oleh DPRD setelah rapat bersama dengan kami,” ujar Kepala UPST TPST Bantargebang Asep Kuswanto, Selasa (5/11/2019).

Anggaran dalam draf anggaran itu diperuntukan di Kali Asem. Kali itu sering menimbulkan masalah, seperti pemicu banjir di lokasi pembuangan.

Kali Asem tertimbun oleh longsor sampah milik TPST Bantargebang, Bekasi. Sehingga arus air yang seharusnya mengalir terbendung. Akibatnya warga sekitar pembuangan mengalami genangan.

“Karena anggarannya sudah tidak ada, saya harus ikuti. Memang benar yang dimaksud program turap itu adalah Kali Asem. Selama ini menjadi biang keladi genangan kalau sudah tertimbun sampah,” kata Asep.

Bukan itu saja, Asep juga mengaku, alokasi anggaran untuk penambahan usia pakai TPST Bantargebang juga masih ditunda. Anggaran sebesar Rp40 miliar itu masih belum diterima, sebelum dinas teknis memberikan penjelasan yang lebih rinci.

“Jadi memang kami sudah menganggarkan sebesar Rp40 miliar untuk memperpanjang umur TPST Bantargebang, karena kajian kami di 2021 sudah tidak bisa menampung lagi,” kata dia.

Cara yang akan dilakukan nantinya, kata Asep, dengan cara menambang sampah yang sudah tertimbun lama di TPST Bantargebang atau disebut landfill mining.

Nantinya, sampah itu akan diolah menjadi bahan bakar atau refused derived fuel (RDF). “Landfill mining ini sebagai program menambah usia pakai TPST,” jelas dia.

Bahkan di 2019, kata dia, pihaknya sudah menggandeng pihak ketiga untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah sampah lama bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi bahan pengganti batu bara.

“Kalau hasilnya bagus, pihak ketiga akan menerima hasil landfill mining sebagai pengganti batu bara mereka,” imbuh dia.

Untuk mendukung terlaksana program itu, diakui Asep, perlu ada kebutuhan lahan yang luas, yakni sekitar 2-3 hektar. Kemudian penambahan alat-alat berupa mesin. “Kebutuhan itu lah yang kami anggarkan di 2020,” ungkap dia.

Pencoretan alokasi anggaran itu bukan tanpa sebab, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengalokasikan anggaran tersebut.

Sebab, kali yang melintasi TPST Bantargebang itu bukan dikelola Pemprov DKI. “Nanti Bapak ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tegas dia.

Sebab selama ini, diakui Taufik, Pemprov DKI tidak bisa menata kali-kali tersebut karena pengelolaannya di bawah pemerintah pusat.

Bahkan, dia juga mempertanyakan status kali di sekitar TPST Bantargebang. “Kami tidak mau tiba-tiba melanggar, kami tidak mau tiba-tiba diperiksa juga,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Siluman Terciduk

### Biaya Kajian Tak Masuk Akal

Pengajuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta kembali ditemukan. Kali ini usulan dari Dinas Kehutanan dan Pertamanan untuk merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan serta pengadaan bibit pohon. Otomatis Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkaskas dan menolaknya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membenarkan, bila pihaknya menemukan anggaran tidak masuk akal yang diajukan oleh Dinas Kehutanan dan Pertamanan. Anggaran itu tertulis sebesar Rp75 miliar untuk membiayai konsultan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan.

"Ini anggaran luar biasa. Jadi ini awalnya kan ada lomba rancangan konsep margasatwa terkait dengan Ragunan. Pemenangnya ada lulusan Atma Jaya Yogyakarta dan dosen ITB. Konsep besarnya membutuhkan anggaran Rp2 triliun sekian. Tapi usulannya ke kami kajiannya Rp75 M," ungkap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Ida bersama anggota DPRD DKI lain menyoroti hal itu. Seharusnya, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, setiap kompetisi kajian dan konsep itu hanya mengajukan ide, tidak perlu sampai mengatur anggaran.

"Harusnya lomba ini kan berbicara konsep besar Ragunan seperti apa. Kita anehnya kalau bicara lomba (tapi ada biayanya, Red). Ya sudah kalian buat aja kajian seperti apa, tidak perlu ada biaya. Nah itu yang agak aneh, jadi kita kita ini belum layak dianggarkan sebesar itu," ucap dia.

Dia menyatakan, Dinas Kehutanan dan Pertamanan akhirnya mengurangi anggaran itu menjadi Rp 55 miliar. Namun, Komisi D DPRD DKI melakukan pemotongan kembali sehingga hanya menjadi Rp 4,4 miliar.

"Usulannya kajiannya Rp75 miliar. Mereka kurang sendiri jadi Rp55 miliar. Itu tetap tidak masuk di akal apakah mungkin si kajian Ragunan memakan biaya Rp55 miliar. Nah, itu menurut kami tidak masuk di akal, akhirnya kebutuhannya di awal merancang besarnya Ragunan mau bagaimana. Akhirnya kita kurangi Rp4,4 miliar," kata Ida.

"Memang (revitalisasi Ragunan, Red) itu perlu diperhatikan, tapi tidak perlu dengan biaya yang kajiannya Rp

55 miliar. Selagi anggaran ini masuk di akal, kita setuju-setuju saja," lanjut Ida.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga mengajukan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pengadaan bibit pohon di Jakarta.

Anggaran tersebut, sambung politisi Partai Nasdem itu, diajukan dalam KUA-PPAS 2020 dan dibahas bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun, rencana itu ditolak karena alasan anggaran tahun lalu masih ada.

Ia dan komisinya mempertanyakan tujuan adanya anggaran yang dibuat Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta itu. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah memiliki program pembagian bibit tanaman gratis.

"Jadi Dishut ada penganggaran bibit pohon dibagikan ke sekolah. Saya tanyakan kemarin, Kementerian LHK itu sekarang dengan 1 KTP bisa dapat 25 pohon. Kita mau bagi bibit pohon ke mana lagi," ujar dia kepada INDOPOS di lokasi yang sama.

Nova mengatakan, dinas berencana membagikan bibit pohon itu ke berbagai sekolah di Jakarta sebagai hiasan dan keperluan lainnya. Namun, hal tersebut pernah dianggarkan di tahun sebelumnya. "Mereka (Dinas Perhutanan dan Pertamanan, Red) bilang ada jenis-jenis tertentu. Untuk hiasan dan segala macam. Kami cek di 2019. Ternyata anggaran masih banyak di sana," tutur dia.

Akhirnya, Nova menyebut komisinya itu memutuskan untuk tidak memberikan anggaran pada program itu. Ia khawatir anggaran akan terbuang karena dana tahun lalu masih ada. "Mubazir. Karena anggaran Rp30 miliar buat beli bibit pohon di Jakarta. Misal 10 ribu (per bibit, Red) atau 20 ribu. Mau dibagikan ke mana tuh? Ini bisa tabrakan dengan program Kementerian," tuntas dia. (dny/aen)